

## ABSTRAK

**PUTRI AYU ARTICA WIDIARTI, NIM : E.1810803, Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bogor Dalam Mengawasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, 2022.**

Anak merupakan Tunas, Potensi, dan Generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Metode pendekatan dilakukan melalui studi kepustakaan yang didukung dengan *interview*. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Peran Dan Fungsi Lembaga Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor Dalam Pengawasan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Untuk Mengetahui Dan Memahami Hambatan serta Upaya Yang Dihadapi Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor Dalam Mengawasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak. KPAD Kabupaten Bogor merupakan lembaga independen yang bertujuan meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak serta mendukung Kabupaten Bogor menuju Kabupaten Layak Anak. KPAD mengalami beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit. Dalam melakukan dorongan kepada para pihak yang berkepentingan seperti kepada pemerintah, pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, orang tua ataupun masyarakat untuk betul-betul memberikan dorongan, masukan, sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kepentingan untuk tumbuh dan berkembangnya seorang anak itu tetap harus dijaga.

Kata Kunci :

Perlindungan Anak,;Kesejahteraan Hukum; KPAD Kabupaten Bogor

## **ABSTRACT**

**PUTRI AYU ARTICA WIDIARTI, NIM : E.1810803, The Role of the Regional Child Protection Commission of Bogor Regency in Supervising Cases of Violence Against Children, Legal Studies Program, Faculty of Law, Djuanda University Bogor, 2022.**

*Children are buds, potentials, and the younger generation who succeeds the ideals of the nation's struggle, has a strategic role and has special characteristics and characteristics that ensure the continuity of the existence of the nation and state in the future. And according to Law No. 35 of 2014, a child is defined as a person who is not yet 18 (eighteen) years old, including a child in the womb. Children's rights are part of the human rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention on the Rights of the Child. The provisions of Article 28b paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia state that every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination. The approach method used in this research is normative juridical, namely the law is conceptualized as a norm, rule, principle or dogma. The approach method is carried out through a literature study supported by interviews. The purpose of this study was to determine and analyze the role and function of the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Bogor Regency in Supervising Cases of Violence Against Children, to Know and Understand the Barriers and Efforts Faced by the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Bogor Regency in Supervising Cases. Violence Against Children. The Bogor Regency KPAD is an independent institution that aims to increase the effectiveness of monitoring the implementation of the Protection and Fulfillment of Children's Rights and to support Bogor Regency towards a Child Friendly Regency. KPAD experienced several problems and obstacles that were quite complicated. In encouraging interested parties such as the government, policy makers, law enforcement officers, parents or the community to really provide encouragement, input, socialization to all Indonesian people that the interests for the growth and development of a child must still be maintained.*

Keywords :

Child Protection, Legal Welfare, KPAD Kabupaten Bogor.